

Kerangka Acuan
Peringatan Hari Ratifikasi CEDAW di Indonesia
National Women's Machinery Indonesia:
Sejarah dan Mandat Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
Serta Pengarusutamaan Gender
30 Juli 2019

Pendahuluan

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang membicarakan kesetaraan substantif bagi perempuan merupakan salah satu perjanjian hak asasi paling pokok dalam sistem kesepakatan internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981 setelah diratifikasi oleh 10 negara dan menjelang ulang tahunnya yang ke-40 pada bulan Desember 2019, Konvensi CEDAW kini telah diratifikasi oleh 189 dari 195 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Lahirnya CEDAW tidak terlepas dari sejarah gerakan perempuan baik di tingkat internasional maupun nasional. Ratifikasi Konvensi CEDAW oleh Indonesia juga turut berkontribusi untuk menguatkan gerakan perempuan di Indonesia. Indonesia memiliki institusi yang berperan dalam menguatkan hak sipil, budaya, sosial dan politik, serta pembangunan yang melibatkan perempuan. Kedua institusi tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KPPPA). Sejarah lahirnya kementerian ini dimulai sejak Indonesia memiliki Menteri Peranan Wanita pada tahun 1974. Institusi yang kedua adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang lahir dari gerakan perempuan pasca terjadinya kekerasan seksual pada tragedi kemanusiaan 13-15 Mei 1998.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW berkewajiban untuk mengimplementasikan seluruh hak asasi perempuan seperti yang tercantum dalam konvensi ini. Selain itu, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan laporan secara berkala kepada Komite CEDAW atas perkembangan dan kemajuan dari implementasi 16 (enam belas) pasal substantif yang tercantum dalam konvensi. Pasca meratifikasi CEDAW pada tahun 1984, hingga kini Indonesia telah menjalankan kewajiban sebagai Negara Pihak dengan memberikan laporan pelaksanaan CEDAW yang terakhir pada tahun 2010¹. Atas laporan CEDAW Indonesia pada tahun 2010 yang merupakan implementasi pelaksanaan CEDAW pada kurun 2007-2011, Komite CEDAW telah mengeluarkan *Concluding Observation* sebagai umpan balik untuk Indonesia

¹ Indonesia seharusnya memberikan laporan pelaksanaan CEDAW periode ke-VIII pada tahun 2016 tetapi hingga kini belum dilaksanakan.

pada tahun 2012. Dalam *Concluding Observation* tersebut, Komite CEDAW menyoroti mengenai *National Machinery for the Advancement of Women* serta merekomendasikan Indonesia untuk memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai kesetaraan Gender. Namun, hingga saat ini rekomendasi dari Komite CEDAW tersebut belum dilaksanakan oleh Indonesia.

Salah satu implementasi Indonesia setelah meratifikasi konvensi CEDAW adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk dapat mengentaskan persoalan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan secara inklusif. Dalam INPRES RI No 9/Tahun 2000 tersebut terdapat peraturan anggaran yang responsif gender. Implementasi peran tersebut belakangan ini menjadi perhatian Komnas Perempuan sebagai bagian dari *National Women's Machineries*. Munculnya wacana pergantian nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga mendapat perbincangan serius dari publik khususnya para pemerhati isu perempuan. Wacana pergantian ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI².

Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, sebagai salah satu yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II, mengatakan bahwa salah satu kesulitan dari implementasi kebijakan terkait isu gender adalah sedikitnya ahli gender di Indonesia untuk membicarakan persoalan penduduk perempuan dan laki-laki yang begitu banyak. Kelangkaan institusi pendidikan di Indonesia yang melakukan pendidikan dan penelitian gender juga merupakan salah satu sebab dari persoalan tersebut, seharusnya kampus-kampus mengisi ruang-ruang *National Women's Machineries* yang telah disediakan. Tantangan lainnya adalah dukungan anggaran yang semakin minim di tengah situasi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya serta jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang semakin beragam—namun hukum Indonesia masih belum dapat menjawab kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dalam melihat situasi terkini sekaligus memperingati hari ratifikasi konvensi CEDAW oleh Indonesia, Komnas Perempuan merasa sangat memerlukan terjadinya pertemuan khusus dengan para pelaku sejarah yang terkait dengan berdirinya kedua institusi tersebut, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan dalam semangat pengarusutamaan gender untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan.

Tujuan

Tujuan diadakannya “Peringatan Hari Ratifikasi CEDAW di Indonesia *National Women's Machineries* Indonesia: Sejarah dan Mandat Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Serta Pengarusutamaan Gender” adalah:

1. Mendapatkan masukan publik terhadap penguatan *National Women's Machineries* seperti Komnas Perempuan dan termasuk terhadap wacana penggantian nama Kementerian PPPA;

² Hafiyyan. “Kemen PPPA Usul Ganti Nama Jadi Kementerian Keluarga.” *Bisnis.com*: 10 Januari 2019, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190110/15/877385/kemen-pppa-usul-ganti-nama-jadi-kementerian-keluarga> (Diakses pada Selasa, 17 Juli 2019)

2. Meninjau kembali mandat KPPPA termasuk kriteria Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penguatan peran pengarusutamaan gender ke depan, pasca 18 tahun pemberlakuan INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Konsep Kegiatan

Diskusi Publik dipimpin oleh moderator dengan menghadirkan:

1. Pelaku sejarah yang akan diundang untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya *National Women's Machineryes* di Indonesia, diantaranya:

- Ibu Linda Amalia Sari Gumelar
- Ibu Khofifah Indar Parawansa
- Ibu Syamsiah Achmad
- Ibu Saparinah Sadli
- Ibu Achie Luhulima
- Ibu Mayling Oey
- Ibu Mely G. Tan
- Ibu Francisia Saveria Sika Ery Seda
- Ibu Ani Widyani Soetjipto
- Bapak Nasaruddin Umar
- Bapak Aziz Husein
- Ibu Yuda Irlang
- Ibu Atashendartini Habsjah
- Ibu Zumrotin
- Ibu Jaleswari Pramodhawardani
- Ibu Sinta Nuriyah
- Ibu Tumbu Saraswati
- Ibu Karlina Supelli

2. Melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya diskusi akan dilanjutkan dengan usulan masukan dan tanya jawab dari publik.

Waktu Kegiatan

Diskusi publik akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019

Pukul : 09.30- 13.00 WIB (ditutup dengan makan siang)

Tempat : Hotel J.S Luwansa

Jl. H.R Rasuna Said No.Kav C-22, RT 2/RW 5,
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940. Telp: (021) 2954303

Target Peserta

Diskusi publik ini terbuka untuk umum dengan target peserta sebanyak 150 orang.

Narahubung

Yulita: yulita@komnasperempuan.go.id, 08562951873.

Jadwal Acara Kegiatan

Waktu	Acara	Keterangan
09.30-10.00	Registrasi peserta (peserta bisa melihat-lihat pameran)	Panitia
10.00-10.05	Pembukaan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
10.05-10.10	Paduan Suara: Tim Padus Komnas Perempuan	MC
10.10-10.20	Keynote Speech Presiden RI ke-3: Bapak BJ. Habibie	MC
10.20-10.30	Sambutan dari Komnas Perempuan	Ketua Komnas Perempuan
10.30-12.00	Talk show bersama para pelaku sejarah dan KPPPA : <i>National Women's Machineryes</i> Indonesia: Sejarah dan Mandat Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan serta Pengarusutamaan Gender	Moderator
12.00-12.45	Masukan dan tanya jawab dari publik	Moderator
12.45-12.55	Paduan Suara: Tim Padus Komnas Perempuan	MC
12.55-13.00	Penutup dan makan siang	MC